

PERAN PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Muhammad Ariel Miftah¹ Nila Sastrawati² Muhammad Anis³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: miftah.ariel13@gmail.com¹

Abstract

This study examines the extent of the role of the Working Group Party in increasing community political participation in Bone Regency in the perspective of siyasah syar'iiyah with juridical and normative syar'i approaches. Various efforts have been made by the Working Group Party in increasing people's political participation, such as building good political communication, encouraging the people of Bone to participate in every election momentum. Obstacles that affect the increase in political participation of the community in Bone Regency include the minimal cost of political parties, public apathy towards political activities, and political education to the community that has not been maximally pursued by various stakeholders. In Siyasah Dusturiyah's view, community involvement in government, including those carried out by political parties, is part of the application of the principle of deliberation.

Keywords: Political party; Participation; Elector; Dusturiyah Siyasah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang sejauh mana peran Partai Golongan Karya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bone dalam perspektif siyasah syar'iiyah dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Partai Golongan Karya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, seperti membangun komunikasi politik yang baik, mendorong masyarakat Bone berpartisipasi dalam setiap momentum pemilihan. Kendala yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bone diantaranya biaya partai politik yang masih minim, sikap apatis masyarakat terhadap aktivitas politik, dan pendidikan politik kepada masyarakat yang belum maksimal diupayakan oleh pelbagai stakeholder. Dalam pandangan Siyasah Dusturiyah, pelibatan masyarakat dalam pemerintahan, termasuk yang dilakukan oleh partai politik merupakan bagian dari penerapan prinsip musyawarah.

Kata Kunci: Partai Politik; Partisipasi; Pemilih; Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan organisasi yang tidak jauh berbeda dengan organisasi pada umumnya, yang sedikit membedakan adalah adanya keharusan untuk membentuk kepengurusan hingga ketingkat kelurahan/desa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 merumuskan definisi partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Partai Politik berfungsi sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pilihan dan arah menuju perubahan yang lebih baik kedepannya dan dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam berwarga negara Yaitu dengan ikut serta dalam menentukan pemimpin pemerintahan, dalam pemilu biasanya dikendalai oleh kurangnya pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat Upaya penanggulangan hal tersebut yaitu partai politik menyediakan wadah diskusi politik untuk mensosialisasikan akan pentingnya partisipasi politik masyarakat.²

Disisi lain, partisipasi politik masyarakat sangat penting sebagai dasar arah ketertiban dan pembangunan. Partisipasi politik tidak hanya berbicara tentang Pemilihan Umum (Pemilu), akan tetapi mampu mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, contohnya, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, dan mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum.³

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 lalu di Kabupaten Bone, terjadi penurunan tingkat partisipasi jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, karena hanya mencapai angka 72 %. Sedangkan pada Pilkada sebelumnya, tingkat partisipasi mencapai 78 %. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satu diantaranya karena Pilkada 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Selain itu, sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagai penyelenggara juga dinilai kurang maksimal. Padahal, dengan hanya satu pasangan calon melawan kotak

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 1.

² Nila Sastrawati. "Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2019): 188.

³ P. Anthonious Sitepu. *Studi Ilmu Politik*, Cet, I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012): 191.

kosong, sosialisasi harusnya dilakukan secara maksimal, agar supaya pemilih tidak apatis sebab masih terdapat pilihan, jika tidak ingin memilih pasangan calon tunggal. Bahkan pasangan calon tunggal tetap harus mengguguli kotak kosong jika ingin memenangkan kontestasi lima tahunan.

Tanggung jawab untuk mensukseskan Pilkada sesungguhnya bukan hanya tugas dari penyelenggara, tetapi termasuk juga partai politik sebagai pengusung calon. Partai Golongan Karya, sebagai partai dengan suara terbanyak di Kabupaten Bone juga menanggung tanggung jawab untuk mendorong partisipasi pemilih, baik pada penyelenggaraan Pilkada maupun Pemilihan Umum (Pemilu). Banyak bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk menstimulasi keterlibatan masyarakat, misalnya dengan menyediakan wadah dan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai ruang-ruang interaksi dengan masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul merasakan kehadiran partai politik sebagai salah satu saluran aspirasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Partai Golongan Karya sebagai partai peraih suara terbanyak di Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam perspektif siyasah syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif *syar'i* dan yuridis normatif.⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kepustakaan.⁵ Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian, editing data, guna memperoleh keputusan yang tepat.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Partai Golongan Karya dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Bone

⁴ Sabri dan Hamzah Hasan. "Pelemahan Eksistensi Partai Politik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 573.

⁵ Andi Hastriana, dkk. "Polemics of Power in Islamic Law Perspective." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2020): 143-155.

⁶ Saadillah Mursyid dan Dea Larissa. "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 447.

Terkait peran Partai Golongan Karya Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sedikitnya dapat diuraikan beberapa upaya yang telah dilakukan, diantaranya:

a. Membangun Komunikasi Politik

Kader dan seluruh infrastuktur Partai Golongan Karya telah berkontribusi dalam membangun komunikasi politik dengan masyarakat sebagai pemilih. Sehingga dapat mengetahui aspirasi dan kepentingan yang dirasakan oleh masyarakat, serta memiliki teknik komunikasi yang baik untuk dapat menyampaikan opini-opini yang positif berkaitan dengan peran Partai Golongan Karya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan juga dapat menggunakan peran media sosial sebagai alat kontrol dalam membangun opini.⁷

Dalam membangun komunikasi politik di Kabupaten Bone, Partai Golongan Karya melalui kader-kadernya telah berupaya melakukan pelbagai komunikasi, namun yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai pemilih baru sebatas dilakukan oleh anggota partai yang sementara duduk di DPRD sebagai anggota legislatif. Kondisi tersebut semakin menguatkan persepsi publik bahwa bahwa komunikasi yang dibangun oleh para anggota legislatif tersebut hanya berorientasi pada kepentingan pribadi untuk meraup suara pada setiap momen politik, dan bukan murni dari gerakan kepartaian.⁸

b. Mendorong Masyarakat Berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah

Melibatkan kader terbaik kepada masyarakat yang lebih kredibel, kapabel, dan aspiratif sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat merasa bahwa apa yang disuguhkan oleh pemerintah melalui perjuangan Partai Golongan Karya adalah memang kebutuhan masyarakat, dan memaksimalkan turun kemasyarakat untuk memberikan edukasi politik agar masyarakat sadar akan politik dan lebih kreatif dalam berpartisipasi.⁹

Dalam hal pemilihan terutama pada pemilihan daerah di Kabupaten Bone, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa diukur

⁷ Suhardimang dan Hadi Daeng Mapuna. "Paslon Tunggal Pilwalikota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1. (2020): 74.

⁸ Eko Harry Susanto. "Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 2 (2013): 163-172.

⁹ Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah Basri. "Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1 no. 1 (2019): 37.

dari tingkat pemahaman terhadap politik.¹⁰ Sehingga perlu adanya pendidikan politik yang terbuka dan terus menerus, sehingga konsepsi permusyawaratan perwakilan yang termaktub dalam bunyi teks Pancasila, khususnya sila keempat dalam terimplementasi. Akan tetapi di Kabupaten Bone masih lemah akan pendidikan politiknya, karena kurangnya gerakan-gerakan dari Partai Golongan Karya sehingga masyarakat tidak menjadi sadar akan politik dan lebih kreatif dalam berpartisipasi politik, maka seyogyanya Partai Golongan karya turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendidikan politik.

Dorongan partai Golongan karya kepada masyarakat Bone untuk berpartisipasi dalam Pilkada itu masih lemah, karena terbukti dari turunnya partisipasi pemilih Pilkada 2018, dikarenakan partai Golongan Karya tidak memedulikan antisipasi dini kepada masyarakat dengan memberikan pendidikan politik terutama pengetahuan tentang pemilihan tunggal, Partai Golongan Karya hanya mengutamakan kepentingan – kepentingan partai tanpa melihat pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Bone, sehingga masyarakat Bone enggan untuk berpartisipasi dalam Pilkada karena mereka beranggapan bahwa pemenangnya telah terpilih tanpa melalui pemilihan.

c. Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Bone

Perwujudan aspirasi di Kabupaten Bone memberikan permasalahan lain dalam merealisasikannya. Beberapa masyarakat mengeluh tentang aspirasi mereka tidak ditanggapi dengan baik dan aspirasi ini sangat diharapkan oleh masyarakat karena tidak ditanggapi secara turun temurun.¹¹

Menyiapkan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi contohnya dengan membangun rumah aspirasi, dan juga aspirasi masyarakat mampu tersalurkan dengan baik melalui lembaga legislatif yang nantinya akan dipertimbangkan untuk disahkan menjadi kebijakan.¹²

Partai Golongan Karya dalam mewujudkan aspirasi masyarakat Bone belum maksimal, karena meskipun Partai Golongan Karya telah menyiapkan wadah untuk

¹⁰ Alda Muchtar dan Subehan Khalik. “Tanggung Jawab KPU Terhadap Partisipasi Pemilih Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2018 Dan Faktor yang memengaruhinya.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 3 (2021): 616.

¹¹ Rafika Shopia, dkk. “Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Di Wilayah Kota Pekanbaru Dalam Menyerap, Menghimpun, Dan Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau JOM Fakultas Hukum*, 1, no. 2 (2014): 6.

¹² Nila Sastrawati. “Peran Negara Dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender.” *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 1 (2021): 97.

menyerap aspirasi tapi mereka tidak merealisasikannya, ini menimbulkan keluhan masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya tapi tidak terproses dengan baik.¹³

2. Kendala yang Mempengaruhi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Bone

Kendala yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten bone adalah kurangnya dukungan materiil dalam membiayai suatu kegiatan. Salah satu kegiatan Partai Golongan Karya yang sangat penting akan tetapi memerlukan biaya yang besar adalah Rumah Aspirasi.¹⁴ Kegiatan ini sangat perlu pembiayaan karena tidak hanya perabotan – perabotan dalam rumah yang dibiayai akan tetapi penjaga rumah aspirasi juga perlu digaji secara continue, agar rumah aspirasi berfungsi sebagaimana semestinya, tapi nyatanya partai Golongan Karya tidak mampu membiayai tersebut. Maka mereka mengakali hal tersebut dengan menjadika rumah aspirasi layaknya tempat ronda atau tempat minum kopi agar tidak ada yang perlu digaji.¹⁵

Hambatan lain ialah sikap apatis masyarakat Bone dalam aktivitas politik. Masyarakat di Kabupaten Bone apatis dalam aktivitas politik, ini merupakan rendahnya ukuran demokrasi di Kabupaten Bone, menimbulkan rasa antipati masyarakat baik dari perkataan dan perbuatan sehingga mereka tidak percaya sepenuhnya kepada partai Golongan Karya, dan juga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tidak politis, contoh nyatanya saja kejadian yang berbudaya di Kabupaten Bone, yaitu berfikir secara kekeluargaan yang menyebabkan masyarakat memilih bukan karena kualitas tapi memilih karena keluarganya¹⁶.

Edukasi politik masyarakat masih minim, yakni pada kendala yang kedua salah satu alasan kenapa masyarakat di Kabupaten Bone apatis dalam aktivitas politik karena minimnya akan pengetahuan politik. Hal ini merupakan tugas penting dari partai politik terutama partai Golongan Karya di Kabupaten Bone dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat.¹⁷ Akan tetapi sekretaris Partai Golongan Karya telah menjelaskan

¹³ Syahrir Karim dan Samsu Adabi Mamat. "Islamisme Dan Demokratisasi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Sosio-Politik." *Jurnal Sulasena* 7, no. 2 (2012): 150.

¹⁴ Alda Muchtar dan Subehan Khalik. "Tanggung Jawab KPU Terhadap Partisipasi Pemilih Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2018 Dan Faktor yang memengaruhinya.": 614.

¹⁵ Kusnadi Umar dan Patawari Patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *Jurnal Petitum* 9, no. 1 (2021): 82.

¹⁶ Firman Anugrah dan Hadi Daeng Mappuna. "Fungsi Camat Dalam Kampanye Pemilu Di Kota Makassar Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 394.

¹⁷ Rahmatiah HL. "Sikap Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 384.

penyampaian edukasi politik partai Golongan karya dari kalangan muda yang masih duduk dibangku SMA, dengan menyampaikan betapa pentingnya politik dalam negara demokrasi dan bagaimana peran masyarakat dalam berpartisipasi politik, sedangkan dalam pernyataan dari tokoh budaya muda di Kabupaten Bone menyatakan belum mendapatkan apa – apa persoalan politik di Kabupaten Bone, dia berharap kepada Partai Golongan Karya karena dikenal dengan partai terbesar untuk memberikan kepada masyarakat wadah terutama dikalangan muda, diberikan sekolah – sekolah politik agar mereka melek politik, tidak apatis terhadap aktivitas politik dan tidak terjadi kesewenang – wenangan dari pemerintah sebab awamnya masyarakat atau tidak bisa memahami apa kebijakan dari pemerintah.¹⁸

3. Peran Partai Golongan Karya dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Partai Golongan Karya menjunjung tinggi sistem demokrasi yang meyakini nilai - nilai agama dan bertentangan dengan demokrasi barat yang tidak menganggap keberadaan agama. Sesuai dengan ideologi politik yang dimiliki oleh Partai Golongan Karya di Kabupaten Bone pada AD-ART Bab III Bagian Kesatu pasal 5 yang tertulis : “Partai Golkar berdasarkan Pancasila.”¹⁹ Maka pada sila pertama setiap perilaku politik partai Golongan Karya harus senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama. Sikap partai Golongan Karya terhadap agama sangat jelas, yakni bukan hanya menghormati keberadaan agama di Indonesia, tetapi juga menghayatinya dan mewujudkannya sebagai tuntutan perilaku dan moralitas politik dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Dilihat dari sudut pandang siyasah dusturiyah, peran Partai Golongan Karya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, karena dalam praktiknya, Partai Golongan Karya telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai partai politik, yang mana dengan melakukan musyawarah untuk kemaslahatan ummat yang dalam agama Islam diperbolehkan agar tidak terjadi kemudharatan dan mengajarkan kepada masyarakat dalam berdemokrasi yaitu dengan tidak mendiskriminasi manusia baik dari segi agama, status sosial, gender, dan ras dan juga mampu membatasi kekuasaan pemerintah, dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan.²⁰

¹⁸ Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi Dalam Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 364.

¹⁹ DPP Partai Golongan Karya. *Ideologi, kenegaraan dan Kebangsaan, Buku Materi Perkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten/Kota*. (Jakarta: Partai Golkar): 22.

²⁰ Nurcholis Madjid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet, I. (Jakarta: Kencana, 2014): 221.

KESIMPULAN

Upaya Partai Golongan Karya Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi pemilih dilakukan dengan berbagai cara, seperti membangun dan memperkuat komunikasi politik, pelibatan pemilih (masyarakat) dalam berbagai kegiatan partai, mendorong seluruh anggota legislatif Fraksi Partai Golongan Karya untuk aktif menyerap aspirasi, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kontribusi partai. Sementara kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih diantaranya minimnya biaya dan sikap apatis masyarakat. Dalam sejarah perspektif siyasah syar'iyah, keterlibatan masyarakat dalam momentum penentuan pemimpin tidak diatur secara spesifik, tetapi juga tidak terdapat *nash* yang secara tegas melarang. Namun jika menggunakan kaidah kemaslahatan, maka sepanjang keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin lebih besar manfaatnya, maka upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih tetap harus diupayakan, termasuk oleh partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anugrah, Firman dan Hadi Daeng Mappuna. "Fungsi Camat Dalam Kampanye Pemilu Di Kota Makassar Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Hastriana, Andi, dkk., "Polemics of Power in Islamic Law Perspective." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2020).
- HL, Rahmatiah. "Sikap Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015).
- Karim, Syahrir dan Samsu Adabi Mamat. "Islamisme Dan Demokratisasi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Sosio-Politik." *Jurnal Sulasena* 7, no. 2 (2012).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Muchtar, Alda dan Subehan Khalik. "Tanggung Jawab KPU Terhadap Partisipasi Pemilih Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2018 Dan Faktor yang memengaruhinya." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Mursyid, Saadillah dan Dea Larissa. "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Sabri dan Hamzah Hasan. "Pelemahan Eksistensi Partai Politik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020).

- Saleh, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1 no. 1 (2019).
- Sastrawati, Nila. “Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2019).
- Sastrawati, Nila. “Peran Negara Dalam Pendidikan Politik Perspektif Gender.” *Jurnal Sipakalebbi* 5, no. 1 (2021).
- Shopia, Rafika, dkk. “Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Di Wilayah Kota Pekanbaru Dalam Menyerap, Menghimpun, Dan Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau JOM Fakultas Hukum*, 1, no. 2 (2014).
- Suhardimang dan Hadi Daeng Mapuna. “Paslon Tunggal Pilwalikota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 1. (2020).
- Susanto, Eko Harry. “Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 1, no. 2 (2013).
- Umar, Kusnadi dan Patawari Patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *Jurnal Petitem* 9, no. 1 (2021).

Buku

- DPP Partai Golongan Karya. *Ideologi, kenegaraan dan Kebangsaan, Buku Materi Perkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten/Kota*. Jakarta: Partai Golkar.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet, I. Jakarta: Kencana, 2014
- Sitepu, P. Anthonious. *Studi Ilmu Politik*, Cet, I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.